BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan proyek-proyek konstruksi membutuhkan berbagai macam sumber daya dan dalam jumlah yang beragam pula. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan pengadaan baik pengadaan barang maupun jasa yang seringkali lebih dikenal dengan istilah *procurement*. Pengadaan adalah cara dan proses yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya, baik sumber daya yang akan diolah menjadi fasilitas maupun sumber daya pengolahnya. Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa LKPP saat ini menerapkan sistem *e-Procurement*.

Menurut Sulaiman dan Chen (2006) pelaksanaan e-procurement di Indonesia masih ada beberapa kendala, Dari sisi pemerintah, Untuk membangun sebuah sistem *e-procurement* yang ideal, diperlukan dana yang cukup besar. Sistem yang dimaksud tentu bukan berupa *portal e-Auction* sederhana, akan tetapi harus mencakup peningkatan infrastruktur seperti *server* dan *broadband,* integrasi dengan unit keuangan, manajemen dokumen, *projectmonitoring*, *data center, security*, hingga *capacity building* dari SDM pemerintah yang akan menjadi pelaksana pengadaan barang dan jasa tersebut.

Jasin (2007) menyebutkan bahwa beberapa kendala atau kelemahan dan permasalahan teknis dalam penggunaan *e-procurement* yang dihadapi diantaranya:

1. Penyedia barang/jasa (*vendor*) banyak yang belum memahami aplikasi *e-procurement*;

2. Pengelola *e-procurement* sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi *e-procurement*;
3. Tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan *password* dan kunci kerahasiaan lainnya oleh *user*, baik Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pelaksanaan Kegiatan maupun Panitia Pengadaan;
4. *Range* jadwal *state* lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti sesuai yang telah ditetapkan;
5. Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya masih sangat terbatas di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Terbatasnya *bandwidth* menyebabkan masih seringnya terjadi kegagalan proses pada aplikasi *e-procurement.*

Pemerintah Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Kabupaten dalam Provinsi Jambi yang pertama kali menerapkan pemakaian sistem *e-Procurement* dalam pelaksanaan pengadaan Barang/jasa, sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kerinci, Pelaksanaan sistem *e-Procurement* telah dimulai sejak tahun 2011. Tujuan dibentuknya LPSE ini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci.

LPSE Kabupaten Kerinci mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang mempunyai alamat *web* http://lpse.kerincikab.go.id/eproc/, alamat *web* ini bisa diakses oleh semua kalangan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan portal LPSE

Kabupaten Kerinci, pada menu Kontak kami yang dikelola oleh *Helpdesk* LPSE Kabupaten Kerinci (http://lpse.kerincikab.go.id/eproc/faqpage diakses Tanggal 10 Juni 2016), terdapat Tanya jawab mengenai masalah pelaksanaan *e-Procurement*. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Dari Prosedur, terkait dengan persyaratan pendaftaran, masalah *login* ke portal, dokumen penawaran, lupa *password* dan *user ID*, ketentuan mengenai *upload* Berita Acara dan indikasi terjadinya kecurangan.
2. Dari Sumberdaya manusia dan kesiapan Tim Layanan Pengadaan, lambatnya penanganan masalah sehingga banyaknya keluhan dari penyedia dan pengguna Sistem *e-Procurement* yang akan mengikuti tender.
3. Ketersediaan Teknologi dan infrastruktur pendukung lainnya, *Server* yang *Error*, *Hotspot* dan *Wifi* tidak bisa digunakan, kegagalan *upload* penawaran karena koneksi internet yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Penerapan *e-Procurement* di daerah, dan juga secara umum, masih bergelut dengan permasalahan ketidakefisienan dalam pelaksanaan proses. Masih terlalu banyak pemborosan (*waste*) berupa kegiatan yang menggunakan sumber daya tetapi tidak menghasilkan nilai yang diharapkan (*value*).

Dengan mengingat masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tender dengan SPSE (*e-Procurement*) karena masih banyak terjadinya KKN, infrastruktur yang belum memadai termasuk jaringan internet dan listrik, kualitas SDM dalam hal Teknologi Informasi yang kurang baik penyedia maupun kontraktor, serta permasalahan pengawasan oleh semua kalangan, maka perlu adanya upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah tender yang dilaksanakan melalui *e-procurement* oleh pemerintah melalui LPSE pada daerah

kota/kabupaten. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan hal tersebut dengan topik :

" *Kajian pelaksanaan tender setelah pemanfaatan e-Procurement pada Proyek Konstruksi di Kabupaten Kerinci*"

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian dari studi ini adalah :

1. Bagaimana prosedur, sumberdaya manusia dan teknologi berperan dalam permasalahan pelaksanaan tender *e-Procurement* di Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana tindakan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam proses tender dengan *e-Procurement* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Peningkatan pelayanan *e-Procurement* memerlukan proses perubahan yang bertahap, dimana pemerintah mencari solusi terhadap masalah yang timbul, dalam menghadapi setiap kendala yang dapat menghambat pelaksanaan terder dengan pemanfaatan *e-procurement*, maka pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan segala dinamika yang timbul, salah satunya mengatasi segala permasalahan yang terjadi.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui permasalahan pelaksanaan tender setelah dimanfaatkannya *e-Procurement* terkait dengan prosedur, sumberdaya manusia dan teknologi pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

2. Mengetahui tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam proses tender dengan *e-Procurement*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan masukan berupa saran dan pendapat bagi Pemerintah dan penyedia layanan pengadaan dalam membuat kebijakan maupun peraturan mengenai *e-Procurement*
2. Dengan adanya identifikasi faktor-faktor permasalahan yang sering terjadi dalam proses tender dengan *e-Procurement*, dapat memberikan informasi bagi kontraktor maupun pihak yang terlibat untuk meningkatkan kredibilitas perusahaannya, baik dalam hal *profit* maupun pemahaman Teknologi informasi.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat umum yang berkepentingan agar bisa mengawasi pelaksanaan tender yang dilaksanakan melalui *e-Procurement*.

1.5 Lingkup Penelitian dan Batasan Masalah

Secara substansi penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman nyata yang nantinya bermanfaat bagi semua *stakeholder* dalam pelaksanaan tender di Kabupaten Kerinci khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tender setelah pemanfaatan *e-Procurement*. Untuk menjaga penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada Kajian Studi literature dan wawancara tentang permasalahan pelaksanaan tender setelah pemanfaatan *e-Procurement*, dalam hal ini di lingkup pemerintah daerah kabupaten kerinci.
2. Lokasi dan objek penelitian dilaksanakan di kabupaten Kerinci dan sebagai objek penelitian terdiri dari 3 (tiga) kelompok ; Pengelola LPSE, Kontraktor dan konsultan

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang dasar teoritis dan kajian studi literatur yang akan digunakan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, diantara kajian literatur yang digunakan diperoleh dari beberapa sumber diantaranya buku, jurnal, serta ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah yang terkait langsung dengan *e-Procurement*.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan secara khusus langkah-langkah, pendekatan, instrumen penelitian, metode pengumpulan data dan lokasi penelitian yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian

Bab ini akan menguraikan hasil dan menyajikan data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara, penyajian hasil disampaikan dalam bentuk deskriptif dan narasi.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang relevan dengan tujuan berdasarkan hasil pembahasan dan disertakan dengan rekomendasi/saran.

Setelah menyusun pendahuluan, pada bab berikutnya akan membahas tinjauan pustaka yang terkait dengan kajian pelaksanaan tender *e-Procurement* pada proyek konstruksi.